

Peran Akuntansi Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19

Atalia Dezy Amalla^{1*}, Andy Dwi Bayu Bawono¹

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl A. Yani Tromol Pos 1, Surakarta, 57102, Indonesia
E-mail: ¹ataliaamalla15@gmail.com

Received: Februari 2021; Accepted: Mei 2021; Published: Juni 2021

Abstract

This study aims to determine whether there has been a change in the preparation of financial reports managed by RSO during the Covid-19 pandemic, what obstacles occurred in the preparation of financial reports, what solutions were implemented, the process of implementing accounting management, the application of the accrual accounting system at RSO in the future. the covid-19 pandemic. This study uses interview techniques. The resource persons are the Head of the Accounting Subdivision and BMN, and the Accounting Staff. Data analysis techniques were obtained from interviews, field notes, and documentation. The results of this study indicate that there is no difference in the preparation of financial reports during the Covid-19 pandemic, the constraints faced are related to local accounts received related to the hospital accounting system; assets that have not been registered as well as upgrading the SAIBA application, the solution applied is to revise the SP3B regarding problems received locally; cross-check between budgeting and financial records; using excel with SAIBA templates, the management implementation process was not long before and during the pandemic because RSO used a load master and posting system, and the concept of e-government was implemented in RSO.

Keywords: accrual accounting, preparation of financial reports during the Covid-19 pandemic.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikelola RSO pada masa pandemi covid-19, kendala apa saja yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan, solusi apa yang diterapkan, proses pelaksanaan pengelolaan akuntansi, penerapan sistem akuntansi akrual di RSO pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang menjadi narasumber adalah Kepala Sub Bagian Akuntansi dan BMN, dan Staf Akuntansi. Teknik analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan pada masa pandemi covid-19, kendala yang dihadapi terkait dengan akun received lokal yang terkait dengan sistem akuntansi rumah sakit; aset yang belum diregister serta upgrade aplikasi SAIBA, solusi yang diterapkan adalah merevisi SP3B tentang masalah received lokal; melakukan cross check antara catatan budgeting dan financial; menggunakan excel dengan template-templat SAIBA, proses pelaksanaan pengelolaan tidak jauh sebelum dan selama pandemi karena RSO menggunakan sistem load master and posting, telah terlaksanakannya konsep e-government di RSO.

Kata Kunci: akuntansi akrual, penyusunan laporan keuangan pada masa Covid-19.

PENDAHULUAN

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menular dari manusia ke manusia apabila mereka saling bersinggungan tanpa mengindahkan jarak aman.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan pedoman yang bisa dijadikan rujukan oleh entitas bisnis, dalam menyusun laporan keuangan ditengah masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut IAI, setidaknya ada beberapa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang harus diperhatikan di masa pandemi. Pertama, penerapan PSAK 8 mengenai Peristiwa Setelah Periode Pelaporan. IAI berpendapat, COVID-19 tidak bisa dijadikan dasar peristiwa yang mengharuskan entitas bisnis melakukan penyesuaian atau adjustment atas laporan keuangan 2019. Mengingat, penyebaran Covid-19 di Indonesia baru diumumkan terjadi pada 2 Maret 2020 dan bukan informasi yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan 2019. Kedua, penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan paragraf 5.571 (c) yang mengatur tentang penghitungan Kerugian Kredit Ekspetasian (KKE) atau Expected Credit Loss (ELC). Menurut IAI, COVID-19 tidak bisa dijadikan dasar oleh entitas bisnis untuk mengukur KKE. Adapun KKE merupakan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian di instrumen keuangan, yang terlihat ke depan atau forward-looking. Metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini menyaratkan setiap tanggal pelaporan, entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi forward-looking yang wajar dan terdukung (reasonable and supportable information). Pedoman ketiga masih terjait dengan penerapan PSAK 71, namun khusus dalam mengukur penyisihan KKE sepanjang umur (lifetime) untuk tahun 2020. Adapun syarat dalam menerapkan penyisihan KKE sepanjang umur adalah jika terdapat peningkatan signifikan dalam risiko kredit (PSRK).

Menurut PMK No. 217/PMK.05/2015 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut, diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negara Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Tujuan PSAP 13 ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan bank terhadap anggaran, antar periode maupun antar BLU. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

SAP berbasis akrual diantaranya wajib diterapkan oleh Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Sesuai dengan pengertian BLU maka dalam melakukan kegiatannya. BLU

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam pengelolaan keuangan BLU, pembinaan keuangan antara BLU pemerintah pusat dan BLU pemerintah daerah dilaksanakan secara terpisah. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh menteri keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan BLU pemerintah daerah, pembinaan keuangan dilakukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan atas pemerintah yang bersangkutan. Meskipun demikian BLU pemerintah pusat maupun BLU pemerintah daerah keduanya sama-sama menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pada PMK No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 1 ayat (4) menyatakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat IAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. Ayat (5) menyatakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian dan pelaporan keuangan BLU.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981 tahun 2010 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit, dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Pengakuan pendapatan pada rumah sakit tidak sepenuhnya menggunakan basis akrual. BLU Rumah Sakit dituntut selalu siap memberikan pelayanan terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga kerja dana untuk mendukung pelayanan. Dalam pengelolaan sumber daya, BLU rumah sakit dituntut dapat menyajikan data dan informasi yang akurat serta tersaji tepat waktu bagi kepentingan berbagai pihak.

Tujuan laporan keuangan BLU rumah sakit adalah menyediakan informasi yang menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kepentingan donatur, investor, kreditur, otoritas pengawasan, pemerintah, dan masyarakat. Pelaporan keuangan rumah sakit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen rumah sakit dalam menjalankan aktivitas operasi untuk itu diperlukan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, laporan keuangan rumah sakit beserta teknik penyusunannya merupakan hal yang penting untuk diketahui guna meningkatkan kualitas penggunaan anggaran dan menghasilkan laporan yang transparan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) merupakan salah satu cara untuk lebih memahami ekonomi informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut, "agency relationship as a contract under which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent".

Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atasnama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak

sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun, politik (Haryanto et al, 2017 dalam Muhamad Indra, 2013).

Teori New Public Manajement (NPM)

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Muhamad Indra, 2013). Perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Muhamad Indra, 2013).

Teori Entitas

Dalam entitas teori yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005) dalam penelitian Muhamad Indra (2013), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Dilihat dari segi fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan (Dr. Rosmary Elsy).

Cash Basis dan Accrual Basis

Menurut Weygant, et al (2007) dalam Riska Trihandayani, cash basis adalah pendapatan dicatat ketika uangnya (kas) diterima dan beban dicatat ketika uang (kas) dibayarkan. Dari definisi tersebut diketahui bahwa apabila yang digunakan adalah akuntansi cash basis maka tidak ada akun-akun terkait dengan utang maupun piutang karena semua transaksi dicatat pada saat adanya uang keluar atau uang masuk. Dalam cash basis seluruh penerimaan kas dianggap sebagai pendapatan dan seluruh pengeluaran kas dianggap sebagai beban. Accrual basis adalah pengakuan beban pada periodenya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan accrual basis maka transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut walaupun kas blm diterima atau dikeluarkan.

Konversi Cash Menjadi Accrual Basis

Kieso, et al (2007:100) dalam Riska Tri handayani, terdapat mengubah dasar pengakuan yang semula menggunakan cash basis menjadi accrual basis. Berikut adalah konersi tersebut:

- Konversi penerimaan kas menjadi pendapatan akrual
Jumlah Kas (diterima pada periode berjalan) xxx
Jumlah Piutang Awal xxx
Jumlah Piutang Akhir xxx
Jumlah Pendapatan diterima di muka awal xxx
Jumlah Pendapatan diterima di muka akhir (xxx)
Total Pendapatan Operasional Akrual xxx
- Konversi pengeluaran kas menjadi beban akrual
Jumlah Kas (dibayar pada periode berjalan) xxx
Jumlah Utang Awal xxx
Jumlah Utang Akhir xxx
Jumlah Beban dibayar di muka awal xxx
Jumlah Beban dibayar di muka akhir (xxx)
Total Beban Akrual xxx
- Laba Akrual = Pendapatan Akrual – Beban Akrual

Pengertian Akuntansi Akrual

Pengertian akuntansi akrual dalam PP No. 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen LKKL berbasis akrual adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan

Menurut Yananto Mahadi Putra (2018) berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 7, yang dimaksud laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Komponen Laporan keuangan

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca Laporan Operasional
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan tentang Badan Layanan Umum (BLU)

Pengertian Badan Layanan Umum dalam penelitian Faristina Rosalin (2011) sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan adalah sebagai berikut:

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 13 (PSAP)

PSAP 13 menyatakan bahwa Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga BLU kini melaporkan tujuh laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrual basis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RSO. Waktu penelitian dilakukan pada 21 Oktober 2020 sampai 20 Maret 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, yaitu dengan 3 narasumber yang terdiri dari Kepala Sub bagian Akuntansi dan BMN, dan Staf Akuntansi. Mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi, penelitian diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara dan alat perekam untuk melaksanakan wawancara terhadap informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi Akrual di RSO

RSO mulai menjadi BLU sejak 26 Juni 2007, standar yang digunakan dalam membuat laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang mulai digunakan sejak tahun 2015.

RSO mulai menjadi BLU sejak 26 Juni 2007, standar yang digunakan dalam membuat laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. SAP berbasis akrual mulai digunakan di RSO sejak tahun 2015. (Narasumber 3).

Proses Pelaporan Akuntansi Akrual

Proses yang digunakan dalam sistem pelaporan keuangan sebelum menjadi sistem akuntansi akrual yaitu menggunakan CTA (Cash Toward Accrual) yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. RSO berstatus BLU sistem pelaporan keuangannya berdasarkan SAP dan berdasarkan SAK. Laporan BLU menggunakan SAK, sedangkan laporan keuangan pemerintahannya menggunakan SAP.

Menggunakan CTA (Cash Toward Accrual) diatur dalam PP No. 71 tahun 2010, dulu kita (RSO) statusnya BLU jadi Blu itu sistem pelaporan keuangan berdasarkan SAP dan berdasarkan SAK sampai tahun 2018, 2018 kesini itu sudah pakai SAP. Jadi laporan BLU menggunakan SAP eh SAK ya, sedangkan laporan keuangan pemerintahannya itu menggunakan SAP. (Narasumber 1)

Kesiapan Para Pelaksana Penerapan SAP Berbasis Akrua

Penerapan SAP diinisiasi oleh pemerintah oleh Kementerian Keuangan lalu diturunkan ke Dirjen per-Kendaraan dan ke KPPN, dimana para pelaksana ini ada pelatihan yang yang disebut PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah).

Ini kesiapan para pelaksana? Ya, dari penerapan SAP itu kan diinisiasi oleh pemerintah oleh Kementerian Keuangan trus diturunkan ke Dirjen per-Kendaraan dan ke KPPN nah, para pelaksana ini dilatih namanya PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah) itu narasumber 2 tahun berapa ya? Yang paling dulu siapa? Narasumber 3 tahun 2015. Narasumber 3 pelatihannya selama 21 hari. Eh dulu duluan narasumber 2 sepertinya. Saya (narasumber 1) hanya 5 hari saja. Namanya PPAK (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan). (Narasumber 1)

Kendala dan Hambatan dalam Penyusunan Laporan

- Pada segi e-recount kendala yang terjadi adalah received lokal karena berhubungan dengan sistem akuntansi rumah sakit dan tidak bisa memilah antara pendapatan pendidikan dan pelatihan yang mengharuskan rincian mahasiswa membayar yang akan di cross check dengan pihak pembayar dalam satu pemberian. (Narasumber 2)
- Pengertian akun received lokal yaitu eliminasi, yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemerintahan, yang tidak mengharuskan dari BLU serta tidak mengharuskan dari satu kementerian, dan dari seluruh instansi dibawah pemerintahan. (Narasumber 2)
- Rumah sakit menerima pendapatan dari siswa, dimana status siswanya berasal dari institusi pendidikan BLU contohnya dari Poltekkes. Karena dianggap sebagai beban Poltekkes maka menjadi pendapatan rumah sakit. Dalam konteks BLU, pada Poltekkes menjadi beban BLU sedangkan di rumah sakit menjadi pendapatan BLU yang harus dieliminasi. (Narasumber 1)
- Ketika melakukan upgrade aplikasi SAIBA yang terjadi pada awal tahun yang memakan waktu dari bulan Mei-Juni dikarenakan belum di launching oleh kementerian keuangan. (Narasumber 1)
- Terdapat akun aset yang belum teregister, yaitu, utang masuk dan persediaan masuk atau utang keluar dengan pembayaran. (Narasumber 1)

Solusi yang Disusun untuk Kendala Penyusunan Laporan Keuangan

- Merevisi SP3B tentang masalah received lokal dengan akun received lokal. Pada masalah aset tetap pada persediaan yang belum teregister yaitu dengan melakukan cross check. Sedangkan pada aplikasi yang belum di launching yaitu menggunakan excel terlebih dahulu dengan format dan template-template SAIBA. (Narasumber 1)
- Penggunaan manual pada aplikasi excel yang digunakan dalam rentan waktu yang telah ditentukan, dan tidak ada report kepada Kementerian Keuangan selama penggunaan aplikasi excel. (Narasumber 2)

Kriteria yang Harus Dimiliki Pembuat Laporan Keuangan

Kriteria yang harus dimiliki oleh pembuat laporan yang pertama yaitu harus memenuhi kualifikasi basis Pendidikan Akuntansi, S1 Akuntansi. Yang kedua harus memahami Standar

Akuntansi Pemerintahan dan aturan-aturan turunannya seperti PMK, sedangkan aturan-aturannya selalu update yang harus diikuti.

Harus memenuhi basis pendidikan akuntansi, SI Akuntansi sedangkan dari kualifikasi. Lalu memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan-aturan turunannya misalnya, PMK, tetapi aturan-aturannya selalu update itu yang harus diikuti. Sebenarnya itu saja relatif mudah laporannya. Ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang harus ada solusinya. (Narasumber 1).

Sarana dan Prasarana untuk Penerapan SAP

Sarana dan prasarana yaitu tersedianya aplikasi SAIBA dari Kementerian Keuangan, aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAK-BMN, e-recount dengan KPPN, aplikasi SAS.

Sarana prasarana terutama aplikasi yaitu tersedianya aplikasi SAIBA dari kementerian keuangan yang sangat mendukung, kemudian juga aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAK BMN, e-Recount itu dengan KPPN, aplikasi SAS. (Narasumber 1)

Sistem Pembagian Tugas Dalam Pembuatan Laporan

- Pembagian tugas oleh dua narasumber yang bekerja pada bagian Staf Akuntansi salah satu dari mereka merekap catatan kesalahan laporan dan salah satu lainnya sebagai pendukung. Yang dahulunya mereka saling bergantian. Pada tahun ini (2020) narasumber 2 membuat jurnal pendukung. Dan sisanya hanya mengerjakan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) dan laporan-laporan. (Narasumber 2)
- Pembagian tugas terdapat SK (Surat Keterangan) yaitu UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dan UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) di PMK terdapat verifikator dan operator, tugas verifikator yaitu mengentri data, sedangkan tugas verifikator yaitu melakukan verifikasi. (Narasumber 1)

Sikap Para Pelaksana Terhadap Penerapan SAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Para pelaksana terikat dalam kode etik pegawai, kontrak kerja sebagai pegawai PNS harus patuh terhadap penerapan SAP untuk membuat laporan keuangan dimana tiap tugas dari Kementerian nanti turun ke rumah sakit dan sampai ke pelaksana dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya patuh pada standar, kemudian patuh terhadap kontrak kinerja tiap tahun yang dibuat oleh pelaksana. Dan ada reward terkait terhadap penilaian kinerjanya yang terikat dengan penilaian kinerja individu (IKI) atau indeks kinerja individu.

Para pelaksana terikat dalam kode etik pegawai, kontrak kerja sebagai pegawai PNS harus patuh terhadap penerapan SAP untuk membuat laporan keuangan, tiap tugas dari kementerian nanti turun ke rumah sakit dan sampai ke pelaksana itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, patuh pada standar, kemudian patuh terhadap kontrak kinerja tiap tahun yang dibuat oleh pelaksana. Ya, ada reward terkait penilaian kinerjanya, yang terikat dengan penilaian kinerja individu (IKI) atau indeks kinerja individu. (Narasumber 1)

Mekanisme Penanganan Covid-19 di RSO

Dikarenakan RSO bukan rumah sakit rujukan covid-19, tetapi tetap menyediakan preventing apabila terdapat pasien RSO yang positif yang nantinya dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sementara RSO juga menyediakan kamar tekanan negatif di IGD dan di Bangsal. Untuk masalah pencegahannya di RSO mendapat dana dari APBN yang diwujudkan dalam mata anggaran kegiatan persediaan covid-19, misalnya pemberian masker untuk seluruh karyawan, APD medis, lalu ada screening pre-operasi bagi pasien yang akan di operasi.

Kita (RSO) itu kebetulan bukan rumah sakit rujukan covid, yang dilakukan hanya tetap menyediakan preventing jika ada misal pasien Orto yang positif nanti dirujuk ke rumah sakit rujukan. RSO juga menyediakan kamar tekanan negatif di IGD dan Bangsal.. Untuk masalah pencegahannya kita mendapat dana dari APBN yang nanti diwujudkan dalam mata anggaran kegiatan persediaan covid, misalnya pemberian masker untuk seluruh karyawan, APD medis (Alat Pelindung Diri), ada screening pre-operasi bagi pasien yang mau dioperasi. (Narasumber 1).

Sistem Pembayaran Pasien di RSO

- Sistem pembayaran disesuaikan dengan tipe pasien. Yang pertama adalah pasien umum, yang kedua adalah pasien IKS (Ikatan Kerja Sama), yang ketiga adalah pasien JKN atau BPJS. (Narasumber 1)
- Pada pasien umum sistem pembayaran dilakukan dengan cara membayar mandiri atau membayar sendiri yang pembayarannya bisa melalui Bank Mandiri. Pada masa pandemi covid-19 pembayaran dilakukan dengan cara non-tunai untuk mengurangi interaksi dan mengurangi penyebaran covid-19 dapat dilakukan dengan via kartu debit, kartu kredit, OVO, Go-Pay. (Narasumber 1)
- Pasien IKS merupakan pasien jaminan, seperti pasien PT. Pamong Persada dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan Jasaharja yang nantinya dibayar oleh pihak penjamin. (Narasumber 1)
- Pasien JKN atau BPJS yang pembayarannya dibayar oleh BPJS atau JKN contohnya yang memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim. Yaitu untuk pasien umum pembayarannya di kasir pelayanan yang berdampingan dengan pegawai Bank Mandiri dimana uangnya langsung diterima oleh Bank Mandiri dan menerbitkan kwitansi resmi pembayaran. (Narasumber 1)

Kesiapan Pihak Akuntansi Terhadap Kebijakan yang berubah dalam Rangka Covid-19

Kesiapan dari pihak akuntansi berada dibawah Dirjen Kemenkes, dan ada instruksi dalam bentuk surat edaran (SE) yang mengatur tentang penanganan covid-19 di rumah sakit baik rujukan maupun non rujukan. Misalnya surat edaran mengenai revisi anggaran sebagian nanti dialihkan menjadi realokasi anggaran penanganan covid-19. Kecuali jika ada surat edaran tentang kebijakan pengungkapannya laporan keuangan.

Dari segi kesiapan dari pihak akuntansi, kita (RSO) dibawah dari Dirjen Kemkes. Terdapat instruksi dalam bentuk SE (Surat Edaran) yang mengatur tentang penanganan covid. Kecuali jika ada SE tentang kebijakan pengungkapannya laporan keuangan. Jadi kita (RSO) sudah ada panduan-panduannya dalam laporan keuangan untuk penanganan covid. (Narasumber 1)

Proses Pengelolaan Akuntansi Selama Pandemi dan Dasar Hukum yang Digunakan

Selama pandemi Covid-19 proses pengelolaan akuntansi tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Hal ini dikarenakan pengelolaan akuntansi di RSO Prof. Dr. R. Soeharso telah cukup lama menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dari Kementerian Keuangan dengan sistem load master and posting data secara elektronik, tidak melalui proses entri manual ke aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan di RSO Prof. Dr. R. Soeharso yaitu:

1. Aplikasi SAS sebagai penyuport data elektronik:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN;

- b. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU) yang akan mendapat pengesahan berupa Surat Pengesahan Pendalatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
2. Aplikasi Persediaan sebagai penyupport data persediaan;
3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai penyupport data aset tetap.
4. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Namun secara kebijakan akuntansi, selain berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum,
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Juga ada update peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan S-22/PB/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
2. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
3. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) di Akhir Tahun Anggaran 2020.
4. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
5. Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
6. Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2020 bagi Satker yang baru pertamakali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
7. Pindahan dana yang dikelola oleh BLU ke BLU lain untuk penanganan pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).
8. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2020 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.
9. Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19.

Sistem kerja dalam pengelolaan akuntansi masih menggunakan sistem Work From Office (WFO), karena rumah sakit merupakan unit pelayanan langsung ke masyarakat. Sistem WFH ini hanya diterapkan pada awal pandemi dan bersifat tidak lama.

Untuk sistem kerja di dalam pengelolaan Akuntansi masih memakai sistem Work From Office (WFO) hal ini dikarenakan rumah sakit merupakan unit pelayanan langsung ke masyarakat. Sistem WFH hanya diterapkan di awal-awal pandemi dan sifatnya tidak lama. (Narasumber 1)

Sistem yang Dilakukan dengan Adanya Konsep e-government

Sistem yang dilakukan dengan adanya konsep e-government di RSO yang meliputi:

1. e-budgeting

2. Penyusunan anggaran di RSO Prof. Dr. R. Soeharso menggunakan aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA – K/L)
3. E-accounting
 - a. Menggunakan aplikasi standar dari Kementerian Keuangan yaitu:
 - i. Aplikasi SAS
 - ii. Aplikasi Persediaan
 - iii. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negar (SIMAK-BMN)
 - iv. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
 - b. Melalui proses rekonsiliasi data dengan KPPN dengan menggunakan aplikasi e-rekon berbasis web di <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/>.
4. E-reporting
 - a. Menggunakan sistem kirim arsip data komputer (ADK) ke unit eselon I dan Kementerian Kesehatan untuk laporan konsolidasian;
 - b. Menggunakan BLU Integrated Online System (BIOS) yaitu, sistem informasi berbasis web yang sedang dikembangkan oleh Direktorat PPK BLU bekerja sama dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan. BIOS diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai BLU yang handal dan terintegrasi untuk bisa dimanfaatkan oleh para stakeholders BLU. (Narasumber 1)

Kendala dan Masalah Dalam Laporan Keuangan

Kendala yang dialami oleh narasumber pada staf akuntansi yaitu dari segi masuk kerja dimana mereka saling bergantian, jadi mereka harus membuat janji dengan bendahara. Misalnya ada recount cash dan bendahara menentukan tanggalnya, sehingga para staf harus menyesuaikan tanggal yang telah ditentukan oleh bendahara. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait mengenai laporan keuangan tersebut menjadi lancar.

Ehm... kalau saya dengan narasumber 3 itu masuknya di gilir, jadi kita harus membuat janji dahulu dengan bendahara, misalnya ada recount cash lalu bendahara minta tanggal berapa ya kita harus masuk sesuai dengan tanggalnya, sehingga koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung laporan keuangan bisa lancar. (Narasumber 2)

Perbedaan Proses Laporan Keuangan untuk Pelaporan dalam Rangka Covid-19

Pada era covid ini tidak ada perbedaan, tetapi ada akun tambahan covid mengenai realisasi belanjanya. Kendalanya karena kunjungan pasien menurun yang berakibat pada belanja dan pendapatan, padahal dari Kementrian itu menargetkan pendapatannya.

Sepertinya tidak ada perbedaan, tapi ada akun tambahan covid mengenai realisasi belanjanya cuma kendalanya di era covid ini kan kunjungan pasien menurun berakibat pada belanja dan pendapatan padahal dari kementrian itu istilahnya mendesak pendapatannya berapa. (Narasumber 1)

Mekanisme Protokol Kesehatan untuk Bagian Keuangan pada Saat Meminta Data pada Bidang Terkait dalam Rangka Covid-19

Menggunakan protokol kesehatan umum seperti memakai masker yang standar, jaga jarak, cuci tangan sebelum masuk ruangan, dengan menggunakan e-mail untuk mengurangi kontak dengan ruangan, dan lebih banyak menggunakan soft copy dari pada hard copy karena berbentuk kertas yang kemungkinan akan banyak dipegang.

Ya protokol kesehatan umum itu memakai masker yang standar, kemudian jaga jarak, cuci tangan sebelum masuk ruangan, dengan e-mail untuk mengurangi kontak dalam

ruangan, lebih banyak menggunakan soft copy dari pada hard copy karena bentuk kertas itu kan kepegang-pegang. (Narasumber 1)

Sumber Pendapatan di RSO

Sumber pendapatan utama RSO berasal pasien, seperti pasien umum, pasien IKS, dan pasien JKN atau BPJS. Sedangkan pendapatan lain berasal dari kerja sama layanan misalnya sewa gedung, sewa ATM, dan parkir.

Pendapatan utama RSO berasal dari pasien seperti yang sudah saya jelaskan tadi pasien umum, pasien IKS, maupun pasien JKN atau BPJS. Tapi, juga ada pendapatan dari kerjasama layanan misalnya sewa gedung, sewa ATM, parkir. Itu hanya sebagian kecil ada juga sewa kantin. (Narasumber 1)

Akun yang Terlibat dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Akun yang terlibat ada 5 jenis akun meliputi Aset, Kewajiban, (Beban utang), Modal (Ekuitas), Pendapatan, dan Belanja. Sedangkan akun-akun covid itu termasuk belanja seperti standar akuntansi baik pemerintah maupun keuangan.

Terdapat 5 akun yang meliputi Aset, Kewajiban (Beban utang), Modal (ekuitas), Pendapatan, dan Belanja. Kalau akun-akun covid itu nanti masuk belanja itu ya sama seperti standar akuntansi baik pemerintah maupun keuangan sama. (Narasumber 2)

Tanggapan Mengenai Opini WTP

Opini WTP di RSO sudah 6 tahun. Sejak awal penyusunan laporan keuangan tidak ada pemeriksaan, tetapi ada kewajiban terhadap WTP. Sedangkan laporan keuangan yang berbasis akuntansi pemerintah di audit terlebih dahulu oleh BPK, dan di RSO hanya dijadikan sample di salah satu unit dibawah Dirjen Kemkes, untuk akuntansi keuangan di audit oleh KAP dan sekarang sudah menjadi satu SAPnya.

Kita (RSO) sejak lama WTP sudah 6 tahun. Sejak awal kita menyusun laporan keuangan tidak ada pemeriksaan, ada kewajiban terhadap WTP. Kalau yang laporan keuangan yang berbasis akuntansi pemerintahan itu kan dulu di audit BPK kita hanya dijadikan sample jadi salah satu unit kerja dibawah Dirjen Kemkes yang akuntansi keuangan itu audit KAP sekarang sudah jadi satu SAPnya. (Narasumber 1)

Menyikapi Temuan dalam LHP

Yang menindak lanjuti adalah SPI terkoordinasi dengan lembaga kinerja yang terkait. Selanjutnya temuannya ditindak lanjuti oleh pihak rumah sakit sesuai dengan rekomendasi dari BPK atau KAP. Biasanya laporan langsung disusun karena laporannya sudah teraudit sehingga bisa langsung dilaporkan untuk segera ditindak lanjuti.

Kalau menyikapi temuan dalam LHP yang menindak lanjuti adalah SPI terkoordinasi dengan lembaga kinerja yang terkait. Temuannya kita tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi dari BPK atau KAP. Biasanya langsung di eksekusi karena laporan yang udah fix audit itu kan kita laporkan langsung sehingga langsung ditindak lanjuti. (Narasumber 1)

Sikap Dalam Menghadapi Auditor

- Kondisi auditor sekarang lebih ketat, karena pemeriksaannya lebih detail dilakukan per akun, sedangkan auditor sebelumnya pemeriksaannya dilakukan hanya akun-akun yang memiliki banyak kesalahan sehingga harus menarik mundur akun persediaan. Kalau dinilai lebih solutif dirasa tidak solutif.
- Apabila dinilai lebih solutif dari BPK seperti jika ada satu temuan yang tidak sesuai atau belum ada, misalnya upaya hukumnya. Seperti di akuntansi pemerintahan banyak aturan yang

mengatur di akuntansi keuangan contohnya ketika terdapat utang yang penyediaanya sudah tidak ada maka seharusnya bisa dihapuskan dan itu belum bisa karena konteks aturannya tidak ada seperti penyedia yang diberi surat konfirmasi utang ternyata mengaku bahwa tidak adanya piutang ke RSO tidak dapat dihapuskan karena dasar atau aturannya tidak ada. Sedangkan di akuntansi keuangan sudah tidak mengakui adanya utang maka dapat dihapuskan, untuk dikatakan tidak solutif oleh pemeriksa iya tidak solutif karena dalam konteks tempat pemeriksaan BPK juga tidak memberi solusi, akan tetapi apabila dianggap solusi jangka panjangnya maka akan mengusulkan ke tingkat kementerian untuk mengatur misalnya terdapat masalah utang-piutang tentang akun-akun yang harus mendapatkan perhatian.

- Seperti pada kasus KAP karena sudah menjadi satu antara laporan PABU dengan SAIBA, biasanya yang menggunakan SAIBA kesulitan untuk mencari jurnalnya. Misalnya jurnal balik pada akun, seperti revisi utang maka akan kesusahan untuk mencari akun lamanya, sehingga mereka manjurnal apa adanya yang sebenarnya tidak bisa. Seperti jurnal yang dibebankan contohnya jurnal SAK dimana utang keluar pada beban dianggap jatuh sebagai barang yang sebenarnya SAK nya tidak bisa, sedangkan SAP juga tidak bisa kemudian belum diregister, sehingga sebenarnya KAP eksternalnya kesulitan karena belum belajar banyak tentang SAP. Mengenai yang dimaksud tidak solutif terkadang bisa, dengan asal mengoreksi tetapi memilih untuk menulis BPK atau Dirjen tidak mau dan pilih yang lain akhirnya tidak jadi dikoreksi sama sekali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 (studi kasus pada RS. Ortopedi (RSO) Prof. Dr. R. Soeharso) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terjadi perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikelola RSO pada masa pandemi sebelum dan selama covid-19, tetapi terdapat akun tambahan covid mengenai realisasi belanjanya. Dan kendalanya pada masa pandemi ini adalah mengenai kunjungan pasien yang menurun berakibat pada belanja dan pendapatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan adalah pada sistem akun received lokal yang berkaitan dengan sistem akuntansi rumah sakit masalah lainnya terdapat akun aset yang belum diregister. Serta upgrade aplikasi SAIBA yang terjadi pada awal tahun dan memakan waktu dari bulan Mei-Juni yang belum di launching kementerian keuangan.
3. Solusi yang dilakukan adalah merevisi SP3B tentang masalah received lokal dengan akun received lokal, pada masalah aset tetap tentang persediaan belum diregister yaitu dengan melakukan cross check antara catatan budgeting dan financial. Sedangkan untuk solusi aplikasi yang belum di launching yaitu terlebih dahulu menggunakan excel dengan format dan template-template SAIBA.
4. Proses pelaksanaan pengelolaan akuntansi tidak jauh berbeda sebelum dan selama pandemi. Karena RSO telah cukup lama menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan dengan sistem load master and posting data secara elektronik, yang tidak melalui proses entri manual ke aplikasi.
5. Dengan sistem online yang diterapkan di dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dan pelaporan itu membuktikan adanya konsep e-government di RSO karena merupakan bukti telah terlaksanakannya konsep e-budgeting, e-accounting, dan e-reporting.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memadukan data dari berbagai sumber.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam mengenai sistem e-government yang meliputi konsep e-budgeting, e-accounting, dan e-reporting.

DAFTAR PUSTAKA

- Catatan IAI Terhadap Dampak Covid-19 Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan: <https://mucglobal.com/id/news/2016/ini-catatan-iai-terkait-dampak-covid-19-terhadap-penyusunan-laporan-keuangan>.
- Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi di Indonesia: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri>.
- Elisye, Rosmery dkk.2016.Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah.Cetakan Pertama.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Graha Pena Jawa Pos: <https://www.deteksicovid19.grahapenajawapos.com/informasi.php?hal=1>
- Kusuma, Muhamad Indra Yudha.2013.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah.Skripsi.Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015: Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005.Tentang Standar Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 220Tahun 2016.Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Putra, Yananto Mihadi.2018.Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol. 11 No. 2. Universitas Mercu Buana.
- Sayifulloh.2017.Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaata Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar).Skripsi.Universitas Hasanuddin.
- Sampel, Franselski Indri dkk.2015.Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual.Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015, Hal 621-630.Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tri Handayani, Riska dkk. Analisis Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Layanan Pemeriksaan Histopatologi (Pa) & Sitologi dr. Soebarkah Basoeki, SpPA Malang.

Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA ISSN: 2337 5601. Volume: 01, Nomor: 01. Universitas Malang.

Virus Corona – Gejala, Penyebab, dan Mengobati – Alodokter:
<https://www.alodokter.com/viruscorona#:~:text=Virus%20Corona%20atauevere%20acute,p>
aru%20yang%20berat%2C%20hingga%20kematian